

UU IKN Segera Direvisi

JAKARTA (KR) - Komisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) atau revisi UU IKN. Persetujuan tersebut diambil setelah Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah memberikan penjelasan terkait revisi UU IKN, kemudian menyerahkan draf revisi UU IKN kepada Komisi II DPR. "Apakah kita bisa menyetujui dan mengesahkan pembentukan Panja ini?"

tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat kerja bersama Pemerintah di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/8). Menurut Doli, dengan sudah dijelaskan dan diteruskannya rancangan undang-undang ini secara simbolik maka bisa segera langsung membentuk panja. (Ant/Has)-d

Mahfud

di Kejaksaan semua mau mengungkap kasus itu dari Rp349 triliun," ujarnya. Sementara itu, yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah kasus transaksi mencurigakan Rp 189 triliun

terkait ekspor emas yang melibatkan instansi di Kementerian Keuangan. Bberapa hal telah diselidiki dari transaksi mencurigakan Rp 189 triliun. Kasus tersebut bukan hanya menasar sisi

kepercayaan saja melainkan perpajakan. "Ini semua sedang berjalan. Tidak ada yang hilang dan tidak boleh hilang. Pada saatnya harus jelas kepada masyarakat," pungkash Mahfud. (Ant/Has)-d

Hasilkan

"Kunjungan ini merupakan tanda niat baik dan komitmen Yang Mulia (Presiden Widodo) untuk memajukan dan memperkuat ikatan sejarah yang erat yang telah dijalan kedua negara," kata William Ruto. Dikatakan, dirinya mewakili seluruh ja-

ran Pemerintah dan rakyat Kenya menyambut hangat kedatangan Presiden Joko Widodo dan seluruh delegasi. Kunjungan Joko Widodo ini bersejarah karena baru kali ini Kenya didatangi Presiden Indonesia. Presiden Ruto dan Presiden Jokowi me-

lakukan berbagai hal dalam pertemuan, antara lain, menetapkan bidang kerja sama prioritas, serta menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman dan letter of intent untuk memperkuat kerja sama komersial dan promosi investasi antara kedua negara. (Ant/San)-d

Kemitraan

sempit, yang dimiliki oleh petani, khususnya di Pulau Jawa. Dengan kepemilikan yang sempit, ini tentunya akan berimbas kebanyak hal. Seperti produktivitas yang rendah yang otomatis berimbas pada pendapatan petani, juga terkait pengajuan kredit ke perbankan. Salahsatu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem klaster. Yaitu memetakan atau mengelompokkan lahan-lahan pertanian yang sempit menjadi satu kesatuan manajemen yang menghasilkan keuntungan bagi petani terutama daerah yang menghasilkan tanaman pangan seperti padi atau jagung. Key points dalam klaster yang dimaksud adalah bergabung dalam suatu kelompok atau perkumpulan, kesamaan usaha (homogenitas), berada dalam satu lokasi/wilayah, kesamaan supplier, kesamaan buyer (off-taker). Pada sistem klaster ini tentunya beberapa stakeholder atau pemangku kebijakan yang terlibat sebagai mitra. (1) Penyedia saproten/saprodi sebagai penyedia input dengan produk-produk yang disepakati dalam klaster, atau bisa disebut sebagai toko tani. (2) Perbankan dan asuransi pertanian, menyediakan platform pinjaman atau kredit bagi petani. (3) Teknologi, menyediakan

teknologi yang bisa dimanfaatkan petani, baik di lahan maupun teknologi digital untuk monitoring. (4) Penjamin keberlangsungan kemitraan, dalam hal ini bisa kementerian atau pemerintah provinsi. Penjamin keberlangsungan kemitraan ini juga berperan sebagai leader yang akan bertanggung jawab dalam kelancaran kegiatan operasional. Kemudian, (5) fasilitator, dalam hal ini adalah dinas pertanian setempat, biasanya untuk pelibatan penyuluh. (6) Offtaker, sebagai penjamin bahwa hasil panen petani mampu terserap secara keseluruhan dengan harga yang pantas, dan (7) petani atau kelompok tani itu sendiri sebagai pelaksana dalam kemitraan. Ketujuh faktor tersebut harus ada dalam suatu kemitraan pertanian. Tujuan dan keuntungan dari program kemitraan pertanian berbasis klaster ini untuk para stakeholder dapat ditinjau dari berbagai pihak. Dari sisi pemangku kepentingan keuangan, program kemitraan berbasis klaster, akan menjadi pintu masuk ke dalam kredit mikro, pengembangan daerah dan masyarakat sekitar, juga inklusi (akses kepada lembaga keuangan/bank) dan literasi keuangan. Selain itu, keuntungan yang

lain adalah perluasan nasabah, pengurangan kredit usaha tani (KUT) serta kepastian pengembalian kredit oleh petani. Dari berbagai pemangku kepentingan, pada akhirnya kemitraan ini menjadi hal yang sangat penting. Agar pengembangan klaster pertanian dapat menguatkan posisi dan meningkatkan hasil panen. Sehingga dapat memenuhi kualitas sesuai dengan kebutuhan off-taker. Dan diharapkan menciptakan kemitraan-kemitraan lain berbasis sistem klaster yang berkelanjutan. Pelaksanaan kemitraan pertanian berbasis klaster ini harus dikerjakan bersama-sama atau kolaborasi antar-kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penelitian/perguruan tinggi, industri dan tentu saja petani. Kolaborasi di antara mereka akan menjadi penentu keberhasilan kemitraan pertanian ini. Keberhasilan kemitraan tidak hanya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani saja. Tetapi kalau kita berpikir lebih luas, keberhasilan kemitraan pertanian akan menjadi kunci swasembada pangan negara. (Penulis adalah Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM)-d

UNTUK PENYEDIA BARANG DAN JASA PROYEK APBD DIY Bank BPD DIY Berikan Pembiayaan

YOGYA (KR) - Sebagai upaya mendukung percepatan realisasi APBD DIY tahun 2023, Bank BPD DIY siap memberikan dukungan pembiayaan dengan produk kredit modal kerja. Jaminannya berupa SPK proyek yang didanai APBD DIY kepada penyedia barang dan jasa.



KR-Istimewa

Narasumber rakor percepatan realisasi APBD Pemda DIY.

"Upaya ini diharapkan dapat membantu stake holder dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara optimal," ungkap Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Utama Efendi Sutopo Yuwono dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Pemda DIY di Hotel Grand Rohan Jogja, belum lama ini. Sekretaris BPKA DIY Maria Damayanti Handayani menyebutkan, realisasi anggaran pendapatan semester I telah tercapai 54,81%. Sedangkan realisasi anggaran belanja sampai dengan semester I ter-

capai 38,20%. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY Yudi Ismono dalam paparannya mengungkapkan beberapa titik kritis dalam tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa. Tahap persiapan pemilihan, evaluasi penawaran, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan agar menjadi perhatian PPKom di seluruh SKPD di lingkungan

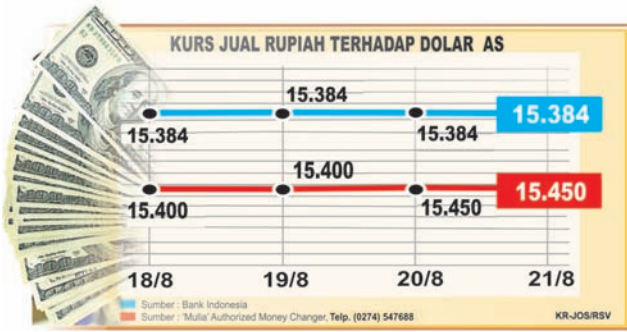
Pemda DIY. Selain itu Inspektorat juga memiliki peranan penting dalam tahapan penyediaan barang dan jasa. "Inspektorat saat ini bukan hanya menjadi pengawas namun juga memiliki peran pendampingan sehingga OPD dapat berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menemui permasalahan," ujar Muhammad Husein, selaku Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat DIY. (Has)-d

Pemda

Salah satu contohnya di Kalurahan Tamanmartani, Kabupaten Sleman telah mendapat sokongan Danais sebesar Rp 7 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat pengelolaan sampah. Selain Sleman, Danais juga disalurkan ke Kabupaten Bantul. Tepatnya untuk Kalurahan Bangunjiwo, Karangtengah, Guvosari, dan Panggungharjo. Sedangkan untuk Kabupaten Kulonprogo berada di Kalurahan Banjararum dan di Gunungkidul di Kepek. "Karena sifat bantuan untuk pengelolaan sampah jadi lebih diarahkan untuk pengembangan terhadap embrio penanganan sampah di kalurahan. Terutama pada kalurahan yang memiliki program penanganan sampah cukup baik. Melalui sokongan Dana-

is ini diharapkan program penanganan sampah yang su-

dah berjalan lebih meningkat lagi," terangnya. (Ria)-d



KR-JOSREV

Prakiraan Cuaca Selasa, 22 Agustus 2023					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C
Bantul					22-30
Sleman					22-29
Wates					22-29
Wonosari					22-30
Yogyakarta					22-30
Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir					65-95

Grafis : Arko



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Yayasan Badan Wakaf (YBW) UII dan Universitas Islam Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya

Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.

Meninggal dunia di Jakarta pada 21 Agustus 2023
Usia: 57 tahun

Dosen Fakultas Hukum UII mulai 1990
Kepala Biro Administrasi Umum UII periode 2001-2002, 2002-2006
Direktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia UII periode 2006-2010, 2010-2012
Kepala Badan Etika dan Hukum UII periode 2012-2014
Pit. Ketua Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum UII pada 2022

Semoga Almarhum mendapat akhir terbaik, diterima segala amal ibadahnya, dan dalam naungan terbaik di sisi Allah Swt. Amin.
Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
Ketua Umum Pengurus YBW UII

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
Rektor

uui.ac.id

Makna Kemerdekaan versi Akademisi



Ferri Wicaksono, SIP, MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Tahun 2023 menandai 78 tahun Indonesia merdeka. Tentu berbagai pihak mempunyai pandangan masing-masing dalam memaknai kemerdekaan. Penulis melalui tulisan ini secara khusus ingin memaknai kemerdekaan dari

sudut pandang akademisi. Kita mulai dari memahami, apa dan siapa itu akademisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi. Selanjutnya lebih ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa lingkup aktivitas akademisi secara spesifik meliputi tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian,

dan pengabdian Masyarakat). Maka profesi yang bisa diidentifikasi sebagai akademisi, antara lain: dosen dan mahasiswa. Lantas apa sejatinya problem akademisi di Indonesia? Pembahasan kita mulai dari problem mahasiswa di Indonesia. Pertama, hingga sampai saat ini belum semua lulusan SMA sederajat mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, problem utama yang menjadi kekhawatiran yakni biaya. Masih banyak masyarakat yang pimis bisa kuliah 'hanya' dikarenakan problem biaya, selanjutnya problem tersebut menjadikan jenjang pendidikan tinggi sebatas 'optional' saja bukan lagi wajib. Disisi lain Indonesia saat ini sedang berpacu menjadi negara maju, salah satu jalannya dengan

meningkatkan tingkat pendidikan tinggi masyarakat. Andai saja jenjang pendidikan tinggi bisa digratiskan oleh negara, mungkin saja antusiasme masyarakat semakin meningkat. Kedua, hingga sampai saat ini istilah skripsi bagi sebagian mahasiswa seolah menjadi momok hambatan untuk lulus. Para pemangku kebijakan bersama dengan akademisi perlu menyepakati konsep pendidikan tinggi baru, dimana syarat kelulusan perlu dibuat solusi alternatif untuk menghindari persepsi 'menyulitkan' versi mahasiswa. Perlu muncul solusi alternatif dengan tetap menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Selanjutnya kita beralih ke problem dosen di Indonesia. Pertama, beban administratif

Dosen telah dibebankan sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), maka perlu konsisten membatasi peran dan tugas dosen sebatas ruang lingkup tersebut. Seringkali dosen terhambat menjalankan peran dan tugasnya dikarenakan terlalu sibuk dengan beban administratif, salah satunya pemberkasan. Lebih ideal jika beban administratif tersebut dibebaskan dari dosen dan perlu dikelola lebih terstruktur di level perguruan tinggi masing-masing oleh pemangku urusan administratif yang tentunya dari kalangan non dosen. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kebijakan dan mekanisme urusan administratif yang lebih compact dengan

pengembangan aplikasi sistem informasi yang 'lebih memudahkan' bagi pemangku urusan administratif dosen. Kedua, problem kesejahteraan. Disini kita tidak sedang memperdebatkan minim, kurang ataupun kecilnya penghasilan seorang dosen. Namun para pemangku kebijakan di Indonesia perlu merasionalisasikan antara perkembangan harga property di beberapa kota besar di Indonesia dengan kemampuan daya beli property. Berbagai tuntutan karya dan studi lanjut bagi dosen tentunya perlu diimbangi kebijakan yang memberikan kenyamanan karir dosen. Seringkali kenyamanan karir dosen terhambat dengan urusan kesejahteraan, maka secara



spesifik tunjangan property bagi dosen perlu dipertimbangkan untuk dimunculkan kedepannya. Problem-problem akademisi tersebut sekaligus memberi gambaran orientasi kemerdekaan versi akademisi. Kemerdekaan yang dimaknai sempit sebagai wujud suatu kondisi bebas dari belanggu penjajahan, perlu diperluas dan dipertajam bahwa kemerdekaan versi akademisi sebagai suatu kondisi dimana akademisi merasakan kenyamanan dalam memenuhi peran dan tugas utama sebagai akademisi. Harapannya makna kemerdekaan semakin meningkatkan produktivitas dan kontribusi akademisi untuk Indonesia Maju.